

PERATURAN DESA BALONGWANGI
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA BALONGWANGI
TAHUN 2021

PERATURAN DESA BALONGWANGI
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA BALONGWANGI
TAHUN 2021



KEPALA DESA BALONGWANGI
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BALONGWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGWANGI

- Menimbang : a. Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiens, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
5. Peraturan president Republik Indonesia nomor 104 Tentang Rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang pengelolaan dana desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lamongan No 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021
16. Peraturan Desa Balongwangi Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2022;
17. Peraturan Desa Balongwangi Nomor 2 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Balongwangi Nomor 3 Tahun 2021 tentang RKPDDes Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGWANGI
Dan
KEPALA DESA BALONGWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BALONGWANGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balongwangi Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. PAD	Rp. 110.600.000
b. Pendapatan Transfer	<u>Rp. 1.734.081.000</u>
c. Pendapatan lain-lain	Rp.
Jumlah pendapatan	Rp. 1.844.661.000

2. Belanja :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 694.100.000
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 431.900.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 160.881.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa	<u>Rp. 532.800.000</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.819.681.000

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan :	Rp.....
a. Pengeluaran Pembiayaan :	Rp. 25.000.000
Jumlah pembiayaan	Rp. 25.000.000

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

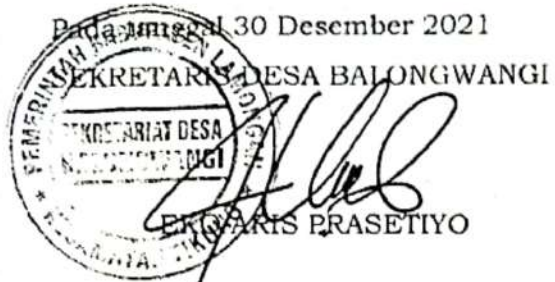
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Balongwangi
Pada tanggal 29 Desember
2021

Diundangkan di Balongwangi

Pada tanggal 30 Desember 2021



KEPALA DESA BALONGWANGI

ttd

KASIONO

LEMBARAN DESA BALONGWANGI Tahun 2021

Nomor : 8



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BALONGWANGI KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGWANGI KECAMATAN
TIKUNG
NOMOR : 188/ 081 /413.323.02/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA BALONGWANGI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALONGWANGI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGWANGI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Balongwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
5. Peraturan president Republik Indonesia nomor 104 Tentang Rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

- Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang pengelolaan dana desa
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 15. Peraturan Bupati Lamongan No 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6.. Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021;
 17. Peraturan Bupati Nomor 13.. tahun 2021.. Tentang tatacara Pengalokasian dan penetapan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2022
 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14.. tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran dana bagian hasil pajak daerah dan retrebusi daerah kepada desa tahun anggaran 2022
 19. Peraturan Desa Balongwangi Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2022;
 20. Peraturan Desa Balongwangi Nomor 2 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 21. Peraturan Desa Balongwangi Nomor 3 Tahun 2021 tentang RKPDes Tahun 2021;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Balongwangi membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balongwangi tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALONGWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balongwangi Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balongwangi
Pada tanggal : 29 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BALONGWANGI

P e t u a



SUNARIYO, S.Ag, M.Pd.I



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BALONGWANGI KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BALONGWANGI KEC. TIKUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

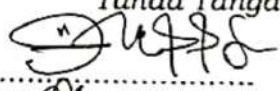
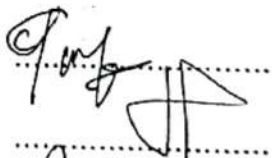
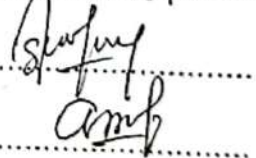
Nomor : 027/ / 413.323.02/2021

Pada hari ini Rabu , tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Balongwangi Kecamatan Tikung. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Balongwangi perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balongwangi tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Balongwangi mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Balongwangi menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balongwangi Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balongwangi Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Balongwangi

- | | <i>Tanda Tangan:</i> |
|---|--|
| 1. <u>Sunariyo, S.Ag, M.Pd.I</u>
Ketua |  |
| 2. <u>Marfi'ah</u>
Anggota |  |
| 3. <u>Sugianto</u>
Anggota |  |
| 4. <u>Kasmadi</u>
Anggota |  |
| 5. <u>Sulaiman</u>
Anggota |  |
| 6. <u>Prasojo</u>
Anggota |  |
| 7. <u>Yasak Arsyad</u>
Anggota |  |

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BALONGWANGI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
a	b	c	d	e	f	g
4	1			PENDAPATAN		
4	1			Pendapatan Asli Desa	110,600,000	PAD
4	1	1		Hasil Usaha	4,100,000	
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDES	0	
4	1	1	90	Lain-lain	4,100,000	
4	1	2		Hasil Aset	106,500,000	
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa	106,500,000	
4	1	2	02	Tambatan Perahu	0	
4	1	2	03	Pasar Desa	0	
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum	0	
4	1	2	05	Jalan-jalan Desa	0	
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa	0	
4	1	2	07	Kios Milik Desa	0	
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah Raga Milik Desa	0	
4	1	2	90	Lain-lain	0	
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
4	1	3	1	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
4	1	3	90	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa	0	
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa	0	
4	1	4	90	Lain-lain	0	
4	2			Transfer	1,734,081,000	
4	2	1		Dana Desa	890,581,000	DD
4	2	1	01	Dana Desa	890,581,000	
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	40,289,900	PBH
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	40,289,900	
4	2	3		Alokasi Dana Desa	492,668,000	ADD
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa	492,668,000	
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi	0	
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	0	
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	310,544,100	BKKPD
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	280,000,000	
4	2	5	90	Lain-lain Bantuan Keuangan dan APBD Kabupaten/Kota	30,544,100	
4	3			Pendapatan Lain-lain	0	
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar desa	0	
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar desa	0	
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	
4	3	3		Penerimaan dan Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0	
4	3	3	01	Penerimaan dan Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0	
4	3	4		Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0	
4	3	4	01	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0	
4	3	5		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan	0	
4	3	5	01	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan	0	
4	3	6		Penerimaan di Kas Desa Pada Tahun Anggaran Berjalan	0	
4	3	6	01	Bunga Bank	0	
4	3	6	01	Bunga Bank	0	
4	3	9		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	0	
4	3	9	90	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	0	
4	4			Jumlah Pendapatan	1,644,681,000	
5				BELANJA		
5	1			Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	686,600,000	
5	1	01		Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	686,600,000	ADD
5	1	01	5	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36,000,000	
5	1	01	01	Belanja Pegawai	36,000,000	
5	1	01	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36,000,000	
5	1	02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	369,423,600	ADD
5	1	02	5	Belanja Pegawai	369,423,600	
5	1	02	01	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	26,694,000	
5	1	02	02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	339,729,600	
5	1	03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47,146,900	
5	1	03	5	Belanja Pegawai	47,146,900	
5	1	03	1	BPJS Kesehatan Kades & Perangkat Desa	17,167,000	
5	1	03	3	BPJS Ketenagakerjaan Kades & Perangkat Desa	29,979,900	BHP
5	1	04		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	8,432,400	ADD
5	1	04	5	Belanja Barang dan Jasa	9,432,400	
5	1	04	01	Alat Tulis Kantor	3,432,400	
5	1	04	02	Benda Pos	2,000,000	
5	1	04	03	Benda Pos	1,000,000	
5	1	04	04	Asli dan Bahan Hukuman	1,200,000	
5	1	04	05	Air, Listrik dan Telepon	1,800,000	
5	1	05		Konsumsi Rapat Pemerintahan Desa	10,200,000	ADD
5	1	05	5	Penyediaan Tunjangan BPD	10,200,000	
5	1	05	01	Belanja Pegawai	10,200,000	
5	1	06		Penyediaan Tunjangan BPD	3,500,000	ADD
5	1	06	5	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3,500,000	
5	1	06	01	Belanja Barang dan Jasa	3,500,000	
5	1	06	02	Alat Tulis Kantor	750,000	
5	1	06	03	- Penggantian	1,800,000	
5	1	06	03	- Konsumsi Rapat	1,800,000	ADD
5	1	07		Penyediaan Insentif/Operasional KATW		

07	5	1	Belanja Pegawai	16.100.000	
07 01			- Insentif RT	12.500.000	
07 02			- Insentif RW	3.600.000	
90			Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok		PAD
90 01	5	1	Belanja Pegawai	110.600.000	
90 01 01			Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	110.600.000	
91			Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		
92			Penyediaan Premi Asuransi	8.000.000	ADD
92 01			Asuransi Forthe Kaurea	8.000.000	
93			Operasional LPM	2.500.000	ADD
93 01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	
93 01 01			- Alat Tulis Kantor	900.000	
93 01 02			- Konsumsi Rapat	1.600.000	
94			Operasional Posyandu	1.000.000	ADD
94 01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	
94 01 01			- Alat Tulis Kantor	300.000	
94 01 02			- Konsumsi Rapat	700.000	
95			Operasional PKK	4.000.000	ADD
95 01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	
95 01 01			- Alat Tulis Kantor	1.000.000	
95 01 02			- Konsumsi Rapat	3.000.000	
96			Operasional Karangtaruna	1.500.000	ADD
96 01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	
96 01 01			- Alat Tulis Kantor	500.000	
96 01 02			- Penggandaan	100.000	
96 01 03			- Konsumsi Rapat	900.000	
97			Operasional Linmas	125.000	ADD
97 01			Belanja Barang dan Jasa	125.000	
97 01 01			- Alat Tulis Kantor	225.000	
97 01 02			- Konsumsi Rapat	500.000	
99			Lain-lain Sub Bidang Sifat dan Operasional Pemerintahan Desa		
01			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.928.000	BHP + ADD
01 01			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.310.000	BHP
01 01 01			Belanja Modal	4.310.000	
01 01 01 01			Kursi Rapat	4.000.000	
01 01 01 02			Fingerpruv	10.618.000	ADD
01 01 01 03			Belanja Modal	5.000.000	
01 01 01 03 01			Komputer	4.000.000	
01 01 01 03 02			Printer	1.018.000	
01 01 01 03 03			Kursi Tunggu		
02			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
03			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)		
90			Pajak kendaraan bermotor		
91			Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Inventaris Desa		
99			Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai dusun		
99			Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		
01			Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01 01			Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		DD
01 02			Penyusunan, Pendaftaran, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.000.000	DD
03			SDGs		
03 01			Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		
03 03			Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil		
05			Pemetaan dan Analisis Komiskinan Desa secara Partisipatif		
99			Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan		
01			Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01 01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000	ADD
01 01 01			Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	
01 01 01 01			- Alat Tulis Kantor	500.000	
01 01 01 02			- Penggandaan	200.000	
01 01 01 03			- Konsumsi Rapat	1.800.000	
02			Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musodus, rembog desa Non Reguler)		
03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000	ADD
03 01			Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	
03 01 01			- Alat Tulis Kantor	500.000	
03 01 02			- Penggandaan	200.000	
03 01 03			- Konsumsi Rapat	1.800.000	
04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000	ADD
04 01			Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	
04 01 01			- Alat Tulis Kantor	500.000	
04 01 02			- Penggandaan	200.000	
04 01 03			- Konsumsi Rapat	1.800.000	
05			Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		
06			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)		
07			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat		
08			Pengembangan Sistem Informasi Desa		
09			Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa		
10			Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD		
11			Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes		
90			Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
91			Penyelenggaraan Evaluasi tingkat perkembangan desa		
92			Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan desa		
93			Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	30.544.100	BKKPO
94			Pemilihan Kepala Desa		BKKPO
94 01			Pembentukan BPD		
94 02			Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		
97			Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu		
99			Sosialisasi berbagai peraturan perundang - undangan di tingkat desa		
99			Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01			Sub Bidang Pertanahan		
01 01			Sertifikasi Tanah Kas Desa		
03			Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)		
04			Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
05			Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan		
06			Kegiatan Penyuluhan Pertanahan		
07			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
09			Penetapan/Pengawasan Batas/patok Tanah Kas Desa		
90			Penetapan dan Pengawasan batas desa		

31				Penyusunan tta ruang desa dan peta desa		
32				Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik desa		
33				Lain-lain Sub Bidang Pertanahan		
34				Sub Bidang Pendidikan		
01				Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakelan dll)	24.000.000	
				Belanja Jasa		
				Insentif Guru PAUD & TPQ		
02				Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	24.000.000	DD
03				Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		
04				Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa		
05				Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa		
06				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/		
07				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar		
08				Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)		
09				Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10				Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
99				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan		
				Sub Bidang Kesehatan	128.800.000	
01				Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)		
02				Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIA Bumil, Lansia, Insentif)		DD
02	5	2		Belanja Barang dan Jasa	7.400.000	
02	02			Pemberian Makanan Tambahan	5.000.000	DD
				- Insentif Kader Pembangunan Manusia	2.400.000	DD
03				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		
04				Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
				Belanja Barang		
				Penanganan Covid 19	71.500.000	DD
05				Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa		
06				Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
07				Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08				Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
09				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **		
90				Pengelolaan sarana prasarana Kesehatan, Sanitasi dan air bersih		BKKPD
				Pembangunan Tangkai Air Bersih Dsn. Kalombo	35.000.000	
2 91				Operasional Mobil sehat	15.000.000	DD
2 91	5	2		Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	
2 91 01				Operasional Mobil Sehat	15.000.000	
2 92				Pengadaan/Pengembangan/Pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas		
2 98				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan		
3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	254.000.000	
3 01				Pemeliharaan Jalan Desa		
3 02				Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
3 02 04				Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
3 05				Pemeliharaan Jembatan Desa		
3 06				Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pancuranase dll)		
3 07				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
3 08				Pemeliharaan Pemakaman (Situs Bersejarah/Petilas Milik Desa)		
3 08	5			Pemeliharaan Embung Milik Desa		
3 08 01				Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	175.000.000	BKKPD+DD
3 09				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	35.000.000	BKKPD
				Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Bakongrong	25.000.000	BKKPD
				Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Banjaran	35.000.000	BKKPD
				Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Banuksan	35.000.000	BKKPD
				Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Leboyo	35.000.000	BKKPD
				Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Planganom	25.000.000	BKKPD
3 12				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)		
3 13				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)		
3 14				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)		
3 15				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		
3 15	5			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)		
3 18				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasn		
3 19				Pembuatan/Permutakuran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)		
3 20				Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
3 90				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)		
3 90	5			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	89.000.000	BKKPD
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	35.000.000	DD
				Pembangunan TPT Dsn. Kalombo	35.000.000	
				Pembangunan TPT Jin Portanan		
3 91				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Nelayan		
2 3 92	5			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga		
2 3 92 01				Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa		
2 3 93				Pengukuran Tanah Mlakam		
2 4				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		0
2 4 01				Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2 4 01 01	5			Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKUN		
2 4 02				Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
2 4 05				Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)		
2 4 05	5			Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)		
2 4 06				Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)		
2 4 07				Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll		
2 4 08				Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)		
2 4 09				Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)		
2 4 10				Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
2 4 11				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)		
2 4 12				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)		
2 4 13				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)		
2 4 14				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman **)		
2 4 15				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)		
2 4 16				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)		
2 4 17				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)		
2 4 90				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)		
2 4 99				Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/rumah sehat untuk fakir miskin		
2 5				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		0
2 5 01				Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2 5 02				Pengelolaan Hutan Milik Desa		
				Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		

5.03					Palatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)			
5.91					Penghijauan/ Pelestarian lingkungan hidup			
5.92					Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/ kolam untuk mata air			
5.93					Pembuatan teras/ tanggul/ pemeliharaan daerah aliran sungai/ pengendalian sungai			
5.94					Penanganan kebakaran hutan dan lahan/ pencegahan abrasi pantai			
5.95					Pengelolaan usaha hutan desa			
5.96					Pembibitan tanaman pangan dan pengadaan saprodi			
5.97					Pengadaan tong sampah			
5.98					Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
6.01					Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
6.02					Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	15.000.000		
6.03					Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balok Dll)			
6.04					Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa			
6.05					Pembangunan/ Pemeliharaan/ Penerangan jalan umum			
6.06					Pengadaan tiang listrik untuk kawasan yang belum teraliri listrik			
6.07					Pengadaan jaringan internet desa			
6.08					Pelatihan Barang dan Jasa			
6.09					Desa IT	15.000.000		
6.10					Master Operator	5.400.000	00	
6.11						9.600.000	00	
6.12					Lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika			
6.13					Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			
6.14					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	0		
6.15					Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa			
6.16					Pengadaan/ Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana energi/ sumber daya alam			
6.17					Pembangunan/ rehabilitasi/ Peningkatan instalasi biogas			
6.18					Lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumberdaya mineral			
6.19					Sub Bidang Pariwisata			
6.20					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa			
6.21					Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)			
6.22					Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa			
6.23					Pengadaan/ Pembangunan sarana dan prasarana Desa Wisata			
6.24					Lain-lain kegiatan Sub Bidang Pariwisata			
6.25					Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
6.26					Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			
6.27					Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban niah Pemdes			
6.28					Kordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa			
6.29					Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			
6.30					Penyediaan Pts Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa			
6.31					Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin			
6.32					Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.			
6.33					Pembinaan Keamanan dan Ketertiban			
6.34					Penanganan Konflik dan mediasi di Desa			
6.35					Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan			
6.36					Lain-lain kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
6.37					Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
6.38					Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa			
6.39					Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/ Kota)			
6.40					Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)			
6.41					Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa			
6.42					Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa **)			
6.43					Pembinaan kerukunan umat beragama			
6.44					Pembinaan kesenian dan sosial budaya			
6.45					Pembinaan lembaga adat			
6.46					Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan			
6.47					Pembinaan kegiatan BAZIS			
6.48					Pengadaan/ Pemeliharaan Alat kesenian			
6.49					Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
6.50					Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
6.51					Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/ Kota			
6.52					Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa			
6.53					Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa			
6.54					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa			
6.55					Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa			
6.56					Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa			
6.57					Pembinaan Olahraga anak usia dini			
6.58					Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga			
6.59					Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Desa			
6.60					Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
6.61					Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
6.62					Pembinaan Lembaga Adat			
6.63					Pembinaan LKMD/ LPM/ LPM			
6.64					Pembinaan PKK			
6.65					Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			
6.66					Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	180.881.000		
6.67					Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0		
6.68					Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
6.69					Pemeliharaan Keramba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa			
6.70					Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa			
6.71					Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Keramba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa			
6.72					Pembangunan/ rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa			
6.73					Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dll)			
6.74					Binreka/ Pelatihan/ Penguatan TTQ untuk Perikanan Darat/ Nelayan **)			
6.75					Pengadaan sarana dan prasarana alat penangkap ikan			
6.76					Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan tempat pendaratan kapal penangkap ikan dan sarana pendukungnya			
6.77					Pembangunan/ rehabilitasi/ Peningkatan gudang pendingin (coldstorage)			
6.78					Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan tempat pelelangan ikan			
6.79					Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	157.681.000		
6.80					Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
6.81					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)			BKKPD
6.82					Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ pengkandang)	35.000.000		
6.83					Peternakan Sapi BKM PD			
6.84					Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)			
6.85					Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Bedahana			
6.86					Pelatihan/ Binreka/ Penguatan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan			
6.87					Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/ Bedahana			
6.88					Pelestarian lingkungan hidup/ pemeliharaan pohon langka			

		Pengadaan/Pemeliharaan alat mesin pertanian		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
		Rubuh	122.881,000	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		DD
		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3,000,000	
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		
		Peningkatan Kapasitas BPD		
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa		
		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa		
		Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Masyarakat Desa		
		Pelaksanaan Program DesaKU pintar		
		Peningkatan pengelolaan keuangan desa		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3,000,000	
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0	
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	0	
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pendes)		
		Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa Bersama)		
		Pelatihan Pengelolaan BUMDesa Bersama		
		Bantuan Modal untuk kelompok tani		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa		
		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa		
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa		
		Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		
		Pengelolaan pasar Desa/usaha jasa dan industri kecil tingkat desa		
		Pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan		
		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
		REKAPITULASI BELANJA KECAMATAN	532,800,000	
		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
		Kegiatan Penanggulangan Bencana		
		Sub Bidang Keadaan Darurat		
		Penanganan Keadaan Darurat		DD
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	532,800,000	
		BLT-DD		
		Penanganan Keadaan Mendesak	1,819,681,000	
		JUMLAH BELANJA	25,000,000	
		SURPLUS / DEFISIT		
		PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan		
		SILPA Tahun Sebelumnya		
		SILPA Tahun Sebelumnya		
		Pencairan Dana Cadangan		
		Pencairan Dana Cadangan		
		Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
		Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
		Penerimaan Pembiayaan Lainnya		
		Penerimaan Pembiayaan Lainnya		
		JUMLAH	25,000,000	
		PEMBAYARAN		
		Pengeluaran Pembiayaan		
		Pembentukan Dana Cadangan		
		Pembentukan Dana Cadangan	25,000,000	
		Penyertaan Modal Desa	25,000,000	
		Penyertaan Modal Desa		
		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		
		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		
		JUMLAH	25,000,000	
		SELISIH PEMBIAYAAN	0	

